

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan pemerintahannya yaitu untuk memajukan daerah agar rakyatnya sejahtera. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah dalam berkreasi dan bereksprosi dalam rangka membangun daerahnya, tentunya dengan tidak melanggar undang-undang. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan seberapa besar sumber penerimaan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka diharapkan pemerintah daerah akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan. Kebijakan tersebut merupakan perwujudan asas otonomi daerah yaitu desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan pembangunan di segala aspek akan menjadi lebih baik. Desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, desentralisasi fiskal juga akan meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993) dalam (Sasana, 2009).

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangatlah penting karena menjadi indikator bagi kemajuan perekonomian daerah yang bersangkutan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan makin kecilnya ketimpangan pendapatan yang terjadi antar penduduk, antar daerah, dan sektor (Kuncoro, 2004). Tinggi dan rendahnya angka pembangunan dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi setiap tahun, Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang menunjukkan sejauh

mana akan menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi meliputi aktivitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dan menentukan angka pendapatan nasional suatu Negara serta kesejahteraan masyarakatnya (Putro, 2010) dalam (Dewi dan Budhi, 2015).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pada skala perekonomian makro, pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB. Pertumbuhan ekonomi dapat dikalkulasikan serta diprediksi melalui besaran angka yang tercantum dalam Tabel produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai totalitas dari akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam siklus perekonomiannya (Kartika dan Dwirandra, 2014) dalam (Dewi dan Budhi, 2015). Secara makro meningkatnya produksi barang dan jasa dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB tiap tahunnya dan per kapitanya (Djoyohadikusumo, 1994) dalam (Maryati dan Endrawati, 2010). PDRB diartikan sebagai totalitas dari akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada siklus perekonomiannya Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017) dalam (Nisa, 2017).

Kebijakan otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 guna pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang (Setyawati dan Hamzah, 2007). Setiap daerah dituntut untuk mampu menggali sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya. Pada akhirnya sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Kewenangan yang lebih

besar diberikan kepada daerah untuk mengoptimalkan PAD nya sehingga PAD yang dianggap sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dinggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan pembangunan infrastruktur yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008). Maryati dan Endrawati (2010) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PRDB), semakin tinggi PAD yang dihasilkan pemerintah daerah maka semakin meningkat pula nilai PRDB pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Perimbangan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Maryati dan Endrawati (2010) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PRDB). Penelitian ini tidak konsisten terhadap hasil penelitian oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, karena harus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Hasil penelitian Maryati dan Endrawati (2010) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sejalan dengan hasil penelitian Setyawati dan Hamzah (2007) yang juga menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Dana Bagi Hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. DBH dialokasikan guna memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah. Dana Bagi Hasil terdiri dari 2 jenis yaitu Dana

Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak. Kusumawati dan Wiksuana (2018) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), tetapi nilai koefisien regresi pada variabel DBH membuktikan adanya pengaruh negatif DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2013) dan Dewi dan Budhi (2015) yang menyatakan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Fungsi utama desentralisasi fiskal yaitu untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Faridi, 2011) dalam (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maryati dan Endrawati (2010) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Penelitian terdahulu oleh Maryati dan Endrawati (2010) dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya perbedaan pada objek penelitian dan tahun periode tersebut apakah penelitian memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti memilih Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi ini memiliki jumlah Kota dan Kabupaten yang cukup luas dan besar, dan Ibukota dari Jawa Timur yaitu Kota Surabaya merupakan kota terbesar ke-2 di Indonesia dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terpesat dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Secara garis besar Kota di Jawa Timur memiliki daerah dengan basis industri yang kuat, seperti: PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) berkantor pusat di Kota Surabaya, saham yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 50%, Pemkot Surabaya sebesar 25%, dan Pemprov Jatim sebesar 25% ; PT. Semen Gresik, PT. Petrokimia dan PT. Maspion yang merupakan salah satu produsen perkakas rumah tangga yg cukup besar di Indonesia, dengan bermacam-macam industri besar yang berada di Kota Gresik, maka kota ini sering kali dianggap sebagai penyangga perekonomian di Jawa Timur. Perbedaan kondisi yang cukup

bervariatif tentunya akan berpengaruh pada sumber-sumber pendapatan yang diterima dan juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Apakah Jawa Timur yang memiliki beberapa perusahaan industri dengan basis yang kuat tersebut akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peneliti menambahkan satu variabel independen Dana Bagi Hasil (DBH) karena sebagaimana dikatakan Dewi dan Budhi (2015) bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya semakin tinggi dana bagi hasil maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk membuktikan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk pengoptimalan mengenai sumber pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil untuk memajukan perekonomian daerah agar rakyatnya sejahtera.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual atau metode penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, menguraikan desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran

variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.